



**PENDEKATAN KOLABORATIF TERKAIT PENCEGAHAN POLITIK IDENTITAS PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(COLLABORATIVE APPROACHES RELATED TO PREVENTING IDENTITY POLITICS IN
REGIONAL HEAD ELECTIONS)**

RESTU HASANUDIN¹, M. YUSUF SAMAD², HENY BATARA MAYA²

¹STIN, restuhasanudin123@gmail.com

²Universitas Hasanuddin, ahmadyusad@gmail.com

³Universitas Indonesia, henybalikpapanui@gmail.com

ABSTRAK:

Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang termasuk Pilkada di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, kerawanan pilkada berupa politik identitas berpotensi terjadi karena rekam jejak sebelumnya pada tahun 2018 pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemicu politik identitas di Kota Kendari dan bagaimana mencegah adanya politik identitas tersebut agar tidak terjadi pada pilkada selanjutnya. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara sejumlah narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemicu politik identitas tersebut adalah faktor kesukuan atau dapat juga disebut dengan politik identitas etnik. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing (penguatan dan/atau pemberdayaan), baik itu pemangku kepentingan kunci, utama dan maupun penunjang.

Kata Kunci: Kolaboratif, Politik Identitas, Pemilihan Kepala Daerah, Kendari.

ABSTRACT:

Indonesia will carry out Regional Head Elections (Pilkada) in 2024 including Pilkada in the Southeast Sulawesi region. However, the vulnerability of regional elections in the form of identity politics has the potential to occur because of the previous track record in 2018 that had occurred in the Southeast Sulawesi region, especially in Kendari City. This study aims to determine the triggering factors for identity politics in Kendari City and how to prevent identity politics from occurring in the next local election. The method used is a qualitative method with primary sources derived from interviews with a number of sources. The results of this study indicate that the triggering factor for identity politics is ethnicity or it can also be called ethnic identity politics. To prevent this, collaborative efforts from stakeholders are needed in carrying out their respective roles (strengthening and/or empowering), both key, main and supporting stakeholders.

Keywords: Collaborative, Identity Politics, Regional Head Election, Kendari.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi secara berkala, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Selain itu, pemilihan legislatif (Pileg) mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah digelar sejak tahun 2005 lalu. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia telah menggelar pemilihan presiden (pilpres) dan Pileg secara perdana dan serentak. Setelah mengalami dinamika pasca reformasi, kenyataan demokrasi di Indonesia mengalami transformasi dan peralihan yang signifikan. Pada ajang perpolitikan, kampanye menjadi sebuah aktivitas berkala yang dilakukan oleh para kontestan pemilu. Kampanye merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi target untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu. Hal ini kemudian membuat posisi kampanye menjadi vital pada ajang perpolitikan.

Permasalahan yang tidak esensi meliputi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), konten berita palsu dan ujaran kebencian, politik identitas, selalu muncul di media dan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Hal itu diperparah dengan adanya mobilitas kampanye di media sosial yang melibatkan banyak orang. Melalui pergerakan pemengaruh (*influencer*) dan pendengung (*buzzer*), penyebaran suatu isu menjadi cepat tapi tidak akurat karena warganet

mudah menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) unggahan yang ada di media sosial. Salah satu isu tidak esensi yang pada pemilu 2019 adalah isu yang pernah terjadi pada Pilkada DKI 2017, yakni politik identitas, seperti etnis dan agama. Isu yang kerap timbul pada proses kontestasi politik skala nasional dan lokal adalah kecenderungan perilaku dan pilihan politik yang dilatarbelakangi oleh identitas etnis. Ruang publik kemudian dipenuhi oleh perbincangan perilaku. Hal tersebut merupakan bagian dari keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka ragam agama, budaya, adat, dan etnis dalam konteks integrasi nasional sehingga konsepsi ini menjadi model bagaimana identitas etnis menjadi simbol kemajemukan dengan tetap memprioritaskan nilai persatuan dan kesatuan (Prayetno, 2016).

Dalam upaya memenangkan ajang pemilu, elite politik memanfaatkan isu politik identitas via kampanye dengan tujuan untuk mengerahkan dukungan calon pendukung ke calon tertentu sehingga dukungan yang didapat bukan karena visi dan misi para bakal calon, tetapi karena perbedaan identitas etnis. Perkembangan di beberapa negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan negara-negara pecahan Uni Soviet mengalami kegagalan demokrasi mayoritas disebabkan oleh perselisihan etnis (Horowitz, 1993).

Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2024. Pesta demokrasi dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung para calon pemimpin. Pemilu serentak



2024 terdiri dari Pilpres, Pileg dan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, baik pemilihan gubernur maupun walikota. Letak Sulawesi Tenggara yang terdiri dari masyarakat yang bermukim di daratan dan kepulauan menyebabkan akan terjadinya politik identitas pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Kota Kendari. Sebagai contoh pada Pilgub 2018 terdapat isu bahwa pasangan calon terbagi menjadi calon yang berasal dari daerah daratan dan kepulauan. Pada pelaksanaan pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2018, terdapat isu beberapa suku masih digunakan oleh partai pengusung dengan memadukan calon dari kepulauan dan daratan. Para partai pengusung melakukan ini dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih pasangan calon sesuai sukunya. Dalam hal ini, identitas etnis seringkali diinstrumenkan berdasarkan keadaan dan tujuan para elite politik atau tim pemenangan dalam pemilu untuk sokongan masyarakat (Rivan, 2022).

Hasil penelitian tersebut dikuatkan oleh pernyataan Pengamat Politik Najid Husain yang menyatakan bahwa politik identitas masih berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan keterpilihan putra daerah dari daratan dan kepulauan sudah menjadi tradisi politik dalam Pilgub Sultra, selama beberapa kali Pilgub Sultra, bakal calon gubernur dari kepulauan

dan daratan selalu terpilih pada kontestasi politik tersebut (Kendari Pos, 2023).

Jika dilihat secara konkret, sebagian masyarakat melihat praktik politik identitas adalah sesuatu yang lumrah mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Hanya saja, jika politik identitas mengarah kepada tindakan diskriminasi kepada kelompok tertentu, maka hal tersebut menjadi masalah yang dapat ditimbulkan oleh politik identitas (Kiftiyah, 2019). sejumlah kasus intoleransi, kekerasan, dan menguatnya sentimen identitas agama dan etnis memunculkan praktik diskriminasi dan istimewa terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini selalu digunakan oleh elit politik yang memiliki peran vital dalam menguatkan sentimen identitas dan agama untuk memperoleh kekuasaan, khususnya menjelang tahun politik (Mahpudin, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik. Lalu, Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat.

Adanya riwayat politik identitas sebelumnya di Sulawesi Tenggara termasuk di Kota Kendari sehingga berpotensi memunculkan

kembali politik identitas tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemicu politik identitas di Kota Kendari dan bagaimana mencegah adanya politik identitas tersebut agar tidak terjadi pada pilkada selanjutnya.

METODE

Tulisan ini fokus pada penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fakta yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan tidak berbentuk angka serta disajikan melalui naratif. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan, menggambarkan, dan menafsirkan data dari situasi yang diamati. Berdasarkan definisi dari penelitian kualitatif. Maka, pendekatan kualitatif relevan dalam menganalisis ancaman politik identitas menggunakan etnis menjelang Pilkada di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari wawancara sejumlah narasumber kemudian hasilnya dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan dan politik identitas.

Pemangku kepentingan adalah kelompok dan perorangan yang terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan, atau yang terdampak positif dan negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara umum, pemangku kepentingan terdiri dari tiga kelompok, yaitu: (1) pemangku kepentingan penunjang yang tidak mempunyai keterkaitan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka ikut berpartisipasi, (2) pemangku kepentingan utama yang menerima dampak positif/negatif dari suatu kegiatan, dan (3)

pemangku kepentingan kunci yang mempunyai efek yang erat kaitannya dengan kebutuhan, masalah, dan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan atau dengan kata lain kelompok ini memiliki wewenang secara resmi dalam penetapan keputusan berdasarkan tingkatan yang dimiliki (Crosby, 1992). Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis temuan penelitian tentang pemangku kepentingan yang berperan dalam pencegahan politik identitas. Para pemangku kepentingan ini kemudian berkolaborasi untuk melakukan pencegahan politik identitas.

Politik identitas merupakan sebuah trik politik yang masih diminati sampai sekarang, pandangan ini biasa terjadi pada kontestasi politik untuk memperoleh kemenangan (Firdaus & Andriyani, 2021). Dalam Pilkada, keberagaman identitas etnis dan agama selalu digunakan untuk kepentingan politik khususnya sebagai alat politik. Perbedaan antara identitas politik (*political identity*) dan politik identitas (*political of identity*) sangat tajam. *Political identity* merupakan konstruksi yang menetapkan kedudukan kepentingan subjek di dalam jalinan suatu komunitas politik, sedangkan *political of identity* merujuk pada proses politik pengorganisasian identitas (politik dan sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis yang membuat seseorang bertindak seakan identitas merupakan identitas yang stabil demi tujuan politis dan praktik tertentu (Haboddin, 2012).

Adapun pemangku kepentingan yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Awardin (Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Kendari); Muhammad Najib Husein (Akademisi Universitas Halu Oleo); Jumwal Saleh (Ketua KPU Kota Kendari); Muh. Salam (Kasat Intelkam Polresta Kendari); dan Manshyur Masie Abunawas (Ketua Umum Lembaga Adat Tolaki).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Dalam kerangka historis, politik identitas di Indonesia cenderung terkait dengan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Politik identitas yang berlebihan dan berakhir pada konflik SARA tidak hanya berdampak pada bobot demokrasi, tetapi juga menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa (I Putu Sastra Wingarta et al., 2021).

Momentum pilkada di Jakarta telah menunjukkan sejumlah fakta terkait kampanye. Kampanye tersebut menimbulkan kasus berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yang membuat organisasi masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa karena dipicu oleh narasi atau opini tentang 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim' (Widyawati, 2021).

Arah politik menjurus pada identitas agama, ekonomi, dan ras, seperti pada kasus Pilkada DKI 2017 putaran kedua yang dimenangkan oleh

pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh politik identitas primordial terkait etnis Tionghoa dan agama. Setiap pasangan calon memerankan identitas masing-masing. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memainkan identitas Tionghoa dan sekaligus menjadi representasi dari ekonomi, ras dan agama, sedangkan pasangan Anies-Sandi memerankan identitas ekonomi, ras dan Islam (Nasrudin, 2019).

Selain di Jakarta, pada Pilkada 2018 di Sumatera Utara, setiap pasangan calon juga melakukan praktik-praktik politik identitas. Praktik politik identitas dilakukan oleh tim Eramas dalam bentuk pendekatan kepada tokoh agama dan adat, sedangkan tim Djoss hanya melakukan praktik politik identitas berupa pendekatan tokoh adat di sejumlah daerah. Cara kerja politik identitas pada tim Eramas berupa aktivitas yang mayoritas bernuansa Islam, meliputi Dzikir Akbar, safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, gerakan subuh berjamaah, fasilitas mobil pembersih masjid, perwiritan, dan berpartisipasi pada kegiatan adat. Sedangkan praktik politik identitas Tim pemenang Djoss berupa aktivitas yang mayoritas bernuansa adat di sejumlah daerah dan berpartisipasi pada kegiatan adat, serta pola keagamaan dilakukan dengan cara berkunjung ke tokoh agama saja (Dauliy et al., 2019).

Penelitian yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Lampung menunjukkan bahwa praktik politik identitas etnis masih kuat di kalangan

masyarakat, khususnya di daerah transmigrasi karena kesamaan rasa sukuisme di daerah yang heterogenik. Etnisitas tetap menjadi alasan utama beberapa pemilih untuk memberikannya karena adanya kesamaan suku. Namun, hal itu bukan satu-satunya alasan karena para pemilih tetap melihat dari prestasi akademik, rekam jejak, prestasi pemerintahan dan sikap para calon. Politik identitas ini juga dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar dapat terpilih pada ajang Pilkada (Parangu, 2018).

Politik identitas etnis dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013 telah dibangun oleh struktur partai politik dan para aktor informal, serta struktur birokrasi pemerintahan untuk menghadirkan semangat etnis dalam memperoleh dukungan politik dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya. Hadirnya kekuatan etnis sebagai kekuatan politik secara pelan mengalihkan kekuatan birokrat dan elit kesultanan yang selama ini berkuasa di Maluku Utara (Salim, 2015).

Di Kota Sorong, Papua Barat, politik identitas etnis juga berperan pada pemilihan kepala daerah. Politik identitas etnik dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan sejumlah kelompok etniknya untuk kepentingan memenangkan kontestasi pilkada di Kota Sorong. Proses kerja politik identitas etnik yang dimainkan oleh etnik Maybrat dan etnik Moi dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, keduanya berkompetisi dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Etnik asli

Papua saling marginalisasi dalam strategi isu kampanye politik identitas, marga, kampung, organisasi etnik, gereja, televisi, spanduk, koran, elit DPRD Kota. Kedua etnik ini tidak dapat bersatu karena adanya egoisme adat, budaya, di antara keduanya. Tujuan dilakukan praktik politik identitas ini adalah untuk mendapatkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi (dana) otonomi khusus (otsus) Kota Sorong (Snanfi et al., 2018).

2. Politik Identitas di Kota Kendari dan Faktor Pemicunya

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa politik identitas pernah terjadi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 khususnya pada Pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2018. Identitas etnik yang diusung pada Pilgub tersebut berupa perwakilan daratan dan kepulauan dengan tujuan untuk kepentingan politik seperti mendulang suara sebanyak-banyaknya demi memenangkan Pilgub 2018 (Rivan, 2022).

Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber terkait politik identitas di Kota Kendari pada saat Pilgub 2018. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, Awardin mengatakan bahwa dinamika politik pada saat Pilgub 2018 sempat mengalami ketegangan karena isu yang beredar adalah politik identitas etnis yang didominasi oleh warga fanatik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesukuan.

“Pandangan saya terhadap politik identitas di Kota Kendari pada saat Pemilihan Gubernur 2018 memang tensinya memang agak sedikit naik tetapi itu tadi berkaitan dengan isu-isu identitas yang dibungkus dengan “persukuan” misalnya calon gubernur A, pasti dia dari suku A maka dia amati suku banyak warga yang fanatik kesana begitu pula calon b calon c kita lihat di Pilgub itu 2018 ada tiga calon, 2 calon ini yang agak besar potensinya waktu itu ada nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ini berpasangan antara kepulauan-daratan yang satunya lagi berpasangan antara daratan dengan kepulauan, kemudian yang satunya lagi antara daratan bagian barat, utara dan kepulauan dan ketiga ini memang identitas kesukumannya yang menonjol masing-masing suku itu yang mendukung siapa calonnya yang dari suku A, suku B, suku C itu tapi setelah selesai pemilihan itu, saya lihat itu melebur kembali tidak terbawa-bawa sampai kemudian ke Pemilu 2019 yang tahapannya berjalan waktu itu” (Awardi, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Menurut narasumber, faktor pemicu munculnya politik identitas di Kota Kendari adalah faktor kesukuan antara daratan dengan kepulauan. Temuan ini sekaligus menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Rivan (2022) mengenai politik identitas di Sulawesi Tenggara pada 2018 lalu.

“Faktor-faktor penyebab politik identitas di Kota Kendari ini politik identitasnya itu masih mengenai persukuan” (Awardi, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Narasumber lainnya, akademisi Universitas Halu Oleo, Muhammad Najib Husein mengatakan bahwa politik identitas berupa isu putra daerah yang dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah.

“Kita memang pernah mengalami politik identitas pada 2018. Putra daerah jadi isu yang sering “dijual” dalam Pemilukada di Kendari” (Najib, komunikasi personal, 25 Maret 2023).

Muhammad Najib Husein menilai bahwa para tim sukses (timses) calon kepala daerah memanfaatkan isu daratan dan kepulauan dalam rangka memperoleh dukungan suara masyarakat.

“Latar belakang karena adanya persamaan entah itu suku, agama, ras yang menjadi latar belakang. Namun, pada 2018 karena adanya keinginan dari pengusung untuk melahirkan sosok calon pemimpin yang notabene adalah perwakilan daratan dan kepulauan. Ini yang dimanfaatkan sama timses untuk mendapat aspirasi suara masyarakat” (Najib, komunikasi personal, 25 Maret 2023).

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara para narasumber, dapat disimpulkan bahwa politik identitas di Sulawesi Tenggara pernah terjadi pada tahun 2018 lalu pada Pilgup tahun 2018 yang dipicu oleh politik identitas kesukuan berupa daratan dan kepulauan.

3. Upaya Kolaboratif

Dalam rangka mencegah politik identitas di Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan upaya-upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan teori pemangku kepentingan menurut Crosby (1992), penelitian ini menyajikan pemangku kepentingan yang dapat berkolaborasi melakukan perannya masing-masing dalam mencegah masifnya praktik politik identitas di Sulawesi Tenggara. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Polres Kota Kendari, Akademisi Universitas Halu Oleo, dan Lembaga Adat.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh mengatakan bahwa KPU Kota Kendari berperan melakukan pencegahan politik identitas melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih di sejumlah lembaga pendidikan. KPU memberikan materi mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh politik identitas tersebut. Selain itu, KPU Kota Kendari memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan tentang kerawanan politik identitas.

“...Kita kan ada namanya program sosialisasi dan pendidikan pemilih, jadi melalui program itu kami sering memberikan materi khusus terkait dengan politik identitas terkait dengan hoaks ini saya kira ini kami jadi bagian dari KPU, tadi melalui sosialisasi ada pendidikan pemilih dan pendidikan pemilih ini menyangkut semua segmen, jadi ada termasuk pemilih pemula kami masuk di sekolah-sekolah materi khusus yang terkait ini sangat kami memang ada materi khusus terkait dengan ini bahaya politik identitas dengan bahaya hoaks, itu kami masukan khusus untuk menghindari adanya politik identitas ini jadi sekali lagi untuk KPU Kota Kendari ini program programnya melalui sosialisasi dan melalui pendidikan pemilih baik secara langsung maupun di *social media*” (Jumwal, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Dari sudut pandang penegak hukum, Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polresta Kendari AKP Muh. Salam menjabarkan tentang perannya dalam mencegah politik identitas di Kota Kendari. Pencegahan dimulai dari pemetaan ancaman politik identitas di sejumlah daerah yang dianggap rawan kemudian bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah.

“Kalo upaya yang dilakukan Polresta dalam hal ini Intelkam yaitu membuat peta

kerawanan di tiap-tiap kecamatan di wilayah hukum Polresta dan melakukan koordinasi kepada Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW untuk sama-sama kita netral, kita jaga Kendari ini untuk tetap kondusif dan tidak ada yang namanya pelanggaran politik identitas” (Salam, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Selain itu, Polresta Kota Kendari bersama dengan pemangku kepentingan lainnya menindaklanjuti jika terbukti ada yang melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada. Tindak lanjut tersebut mengacu pada aturan perundang-undangan.

“Jadi bentuk tindak lanjut dari Polresta *tuh* begini mas, kami kan ada tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan Pemilu. Tim kami terdiri dari Bawaslu, Kesbangpol, Intelkam, Intel Bais, dan KPU yang jika kami menemukan pelanggaran, maka akan kami proses dan tidak segan untuk melakukan penindakan sesuai dengan perundangan yang berlaku” (Salam, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Dalam perspektif nonpemerintah khususnya akademisi, peran yang dilaksanakan berupa edukasi kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk terlibat dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada sekaligus mempercayakan kepada pihak yang

bertanggung jawab jika menemukan adanya pelanggaran Pilkada.

“Nahh, untuk peran saya sebagai akademisi di UHO ini yaitu memberikan pembelajaran dan edukasi kepada mahasiswa/mahasiswi untuk tetap sama-sama mengawal jalannya pesta demokrasi. Serta, tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan masyarakat umum saat menemukan pelanggaran pemilukada dan cukup melaporkan kepada pihak yang berwenang saja” (Najib, komunikasi personal, 25 Maret 2023).

Perspektif nonpemerintah lainnya adalah Lembaga Adat Tolaki (LAT). Menurut Ketua LAT Manshyur Masie Abunawas, LAT berperan menjaga kondusifitas suku Tolaki untuk mengurangi tindakan gegabah yang dilakukan oleh pemuda Tolaki jika menemukan pelanggaran pilkada. Langkah konkretnya adalah pengawasan dan edukasi melalui seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD).

“Jadi begini nak, tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua LAT mengkondusifkan dan melakukan pengawasan kepada suku Tolaki yang notabene suku terbanyak di Kota Kendari dan mengupayakan untuk meredusir gerakan-gerakan anarkis yang akan dilakukan oleh pemuda Tolaki saat menemukan pelanggaran pemilukada dan tetap mengikuti prosedur hukum yang



berlaku yaitu melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Yaitu dengan cara kami melakukan pertemuan untuk memberikan edukasi, pertemuan entah itu seminar atau FGD dengan harapan apa yang kami sampaikan kepada perwakilan pemuda Tolaki dapat diterima untuk tetap menahan diri saat menemukan pelanggaran” (Manshyur, komunikasi personal, 27 Maret 2023).

Dalam konteks ini, narasumber selaku pemangku kepentingan pada penelitian ini dapat dibagi tiga sesuai dengan teori pemangku kepentingan menurut Crosby (1992). Pemangku kepentingan kunci pada penelitian ini adalah KPU Kota Kendari karena mempunyai pengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Kendari. KPU sebagai penyelenggara telah menentukan setiap tahapan penyelenggaraan pilkada mulai dari awal hingga akhir. Kelancaran pelaksanaan pemilukada di Kota Kendari bergantung pada sinergitas KPU Kota Kendari dengan instansi terkait lainnya. Setiap permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pilkada bergantung pada pengambilan keputusan oleh KPU.

Selain itu, pemangku kepentingan penunjang adalah Polres Kota Kendari dan Akademisi Universitas Halu Oleo. Kelompok pemangku

kepentingan ini hanya membantu pelaksanaan kegiatan pemilukada di Kota Kendari. Keberadaan kelompok ini menunjang pemangku kepentingan kunci baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan oleh Polres Kota Kendari yang melakukan pemantauan setiap tahapan pilkada bersama KPU dan instansi lainnya. Secara tidak langsung dilakukan oleh akademisi Universitas Halu Oleo dengan cara melakukan sosialisasi atau pendidikan politik terhadap mahasiswa dan/atau mahasiswi.

Terakhir, pemangku kepentingan utama adalah Lembaga Adat Tolaki. Pemangku kepentingan ini merepresentasikan masyarakat Kota Kendari karena Kota Kendari didominasi oleh Suku Tolaki. Kelompok ini yang menerima dampak negatif jika pilkada di Kota Kendari tidak berjalan lancar apalagi jika terjadi masalah pada saat pelaksanaannya yang menyangkut dengan politik identitas kesukuan. Sebaliknya, dampak positif dirasakan jika pelaksanaan pilkada Kota Kendari berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

Dari setiap upaya yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan, dapat dikatakan bahwa terdapat upaya kolaboratif dari setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya. Peran pemberdayaan dilakukan oleh KPU melalui sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah, peran ini sama dengan yang dilakukan oleh akademisi Universitas Halu Oleo. Sedangkan peran penguatan dilakukan oleh Polres Kota Kendari



dengan cara pemetaan kerawanan wilayah dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya. Sementara untuk Lembaga Adat Tolaki menjalankan peran pemberdayaan dan penguatan melalui edukasi dan pengawasan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa politik identitas di Kota Kendari berpotensi terjadi pada pelaksanaan pilkada 2024 mendatang karena rekam jejak politik identitas di Kota Kendari pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2018 lalu. Adapun faktor pemicu politik identitas tersebut adalah faktor kesukuan atau dapat juga disebut dengan politik identitas etnik. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing dalam bentuk penguatan dan/atau pemberdayaan, baik itu pemangku kepentingan kunci, utama dan maupun penunjang.

DAFTAR NARASUMBER

Awardin, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Kendari, 8 Maret 2023.

Jumwal Saleh, Ketua KPU Kota Kendari, 8 Maret 2023.

Manshyur Masie Abunawas, Ketua Umum Lembaga Adat Tolaki, 27 Maret 2023.

Muhammad Najib Husein, Akademisi Universitas Halu Oleo, 25 Maret 2023.

Muh. Salam, Kasat Intelkam Polresta Kendari, 8 Maret 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Crosby, B. L. (1992). *Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers. Technical Notes, No. 2.* Agency for International Development.
- Dauliy, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik atas identitas agama, dan etnis di Indonesia. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Horowitz, D. L. (1993). The Challenge of Ethnic Conflict: Democracy in Divided Societies. *Journal of Democracy*, 4(4).
- I Putu Sastra Wingarta, Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik*

- Indonesia*, 9(4), 117–124.
- Kendari Pos. (2023). Pengamat : Politik Identitas Masih Berpengaruh. *Kendari Pos*. <https://kendariapos.fajar.co.id/2023/03/06/pengamat-politik-identitas-masih-berpengaruh/>
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia Reconciliation Efforts of Identity Politics Post of Election 2019 in Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 63–75.
- Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Parangu, K. A. (2018). THE POLITICAL CORRELATION OF ETHNIC IDENTITY IN THE ELECTION OF THE 2018 LAMPUNG GOVERNOR. *Seminar Series in Humanities and Social Sciences International*.
- Prayetno. (2016). Menguji Hak Politik Dalam Kontestasi Politik; Analisis Terhadap Politik Identitas Etnis Di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. *Jurnal Pusham Unimed*, VII(2), 39–54.
- Rivan. (2022). Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. In *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. http://eprints.ipdn.ac.id/10802/1/RIVAN_29.1619_POLITIK_IDENTITAS_PADA_PEMILIHAN_GUBERNUR_DAN_WAKIL_GUBERNUR_SULAWESI_TENGGARA_TAHUN_2018.pdf
- Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara Identity Politic in Maluku Utara. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(02), 1667–1678.
- Snanfi, F. L., Darwin, M., Setiadi, & Ikhwan, H. (2018). POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 122–131.
- Widyawati. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 66. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>